

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Akuntansi

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi pemerintah adalah suatu aktivitas jasa yang mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan peristiwa atau transaksi ekonomi yang pada akhirnya menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keputusan yang ditetapkan pada pengolahan sumber data publik di lembaga-lembaga pemerintah tingkat tinggi dan mencakup departemen-departemen dibawah (Sujarweni, 2015) Sedangkan akuntansi dapat diartikan sebagai proses mengidentifikasi, mencatat, mengukur, menghitung, meringkas peristiwa dan transaksi keuangan, serta penyajian hasil. Sektor publik adalah sektor yang mengelola dana masyarakat. Menurut (Sumarsan, 2013) akuntansi merupakan seni untuk menggolongkan, mengidentifikasikan, serta mengklasifikasi catatan transaksi bisnis sesuai dengan kejadian yang berkaitan langsung pada keuangan untuk memperoleh informasi berupa laporan keuangan yang nantinya dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan.

Menurut Wicaksono (2022) akuntansi adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, penganalisaan, peringkasan, pengklasifikasikan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu kesatuan ekonomi untuk menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan yang berguna untuk mengambil

keputusan. Akuntansi juga dipakai sebagai bahasa bisnis karena informasi yang disampaikan hanya dapat dipahami apabila mekanisme akuntansi telah mengerti, akuntansi direncanakan sedemikian rupa agar transaksi yang dicatat menjadi informasi yang berguna bagi para penggunanya..

Dilihat dari beberapa uraian diatas pada dasarnya akuntansi dirancang untuk dapat memenuhi kebutuhan para praktisi. Hal ini bahwa teori akuntansi memiliki hubungan yang defenitif dengan praktik akuntansi. Dasar pengembangan teori akuntansi adalah karena terdapat kebutuhan untuk memberikan sebuah penalaran secara logis bagi seorang akuntan.

2.1.2 Peran Riset Akuntansi

Menurut Wicaksono (2022) ada beberapa peluang riset dalam bidang akuntansi sebagai berikut :

1. Riset Pasar Modal

Merupakan riset yang banyak dipengaruhi oleh data-data keuangan (sekunder) dan cenderung menunjukkan hasil riset yang berkaitan dengan perdagangan sekuritas dipasar modal.

2. Riset Akuntansi Keperilakuan

Merupakan bidang ilmu akuntansi baru yang secara luas berhubungan dengan perilaku seseorang maupun organisasi yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan pengauditan,

3. Riset Pengauditan

Riset pengauditan menyoroti hubungan yang kompleks antara pengalaman dan kinerja yang belum dipahami dengan baik sehingga diperlukan suatu pemahaman dan evaluasi hasil keputusan audit. Kesulitan dengan riset yang berorientasi pada keputusan dalam pengauditan adalah kurangnya kriteria variabel yang dapat diamati terhadap penilaian kinerja auditor.

4. Riset Keuangan

Riset keuangan dalam bidang akuntansi memiliki beberapa keuntungan seperti peramalan laba yang dapat didefinisikan dengan baik dan memiliki sifat yang berulang.

5. Riset Akuntansi Lingkungan

Merupakan riset yang digunakan untuk mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari lingkungan yang terjadi akibat dari aktivitas perusahaan.

6. Riset Akuntansi Sumber Daya Manusia

Dalam teori sumber daya manusia lebih mempertimbangkan suatu cara yang lebih eksplisit dan posisi kompetensi suatu perusahaan bergantung pada spesifikasi bukan duplikasi aktiva.

7. Riset Sistem Informasi Akuntansi

Memiliki sebuah keterbatasan dan kesulitan dalam menggeneralisasi meskipun berdasarkan pada studi sistem akuntansi yang lebih awal. Riset

ini akan berhasil jika fokus utamanya adalah pada variabel yang ada dalam sistem akuntansi.

8. Riset Perpajakan

Fokus dari riset akuntansi dalam bidang perpajakan sebenarnya masih jarang dilakukan. Riset bidang perpajakan lebih pada dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan.

2.1.3 Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah bentuk catatan dan laporan yang disusun untuk memberikan informasi keuangan yang harus dikelola oleh manajemen. Tujuan sistem akuntansi adalah tujuan yang menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan bisnis baru, meningkatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem yang ada dalam hal kualitas, ketepatan penyajian atau struktur informasi untuk meningkatkan pengendalian akuntansi dan pengendalian akuntansi internal, yaitu untuk meningkatkan keandalan dan kinerja, memberikan informasi tentang kewajiban dan melindungi aset perusahaan dan mengurangi biaya administrasi (Mulyadi, 2016). Selain telah diterapkan, sistem akuntansi memiliki keunggulan dalam menyiapkan informasi yang benar dan akurat, sehingga perusahaan dapat melakukan aktivitas *value chain* secara efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas dan pengurangan biaya. Produksi produk yang dihasilkan dapat meningkatkan efisiensi kinerja bisnis, baik di departemen keuangan maupun departemen lainnya, meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan, dan meningkatkan peran berbagai pengetahuan.

2.1.4 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan serta kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan keseluruhan dari laporan keuangan ini adalah untuk kepentingan umum dalam memberikan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja dan arus kas dari entitas yang sangat membantu dalam mengambil keputusan bagi para pengguna menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009 (IAI). Laporan keuangan berisi informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan entitas pelaporan wajib untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dan hasil pelaksanaan kegiatan yang sistematis dan terstruktur selama laporan.

2.2 Good Governance

2.2.1 Pengertian *Good Governance*

Menurut Koiman (2019) *Good governance* diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. *Good governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik.

Menurut Mardiasmo (2020) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*,

dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Sedarmayanti (2019) *good governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjelaskan disiplin anggaran serta pendiptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas organisasi.

Menurut Rochman (2019) *good governance* adalah pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif. Menurut Rasul (2012) munculnya konsep *good governance* di Indonesia sebagai reaksi atas perilaku pengelola perusahaan yang tidak memperhitungkan stakeholdernya. Hal ini terlihat jelas ketika krisis terjadi di Indonesia. Krisis tersebut memberi pelajaran berharga bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini ternyata tidak didukung struktur ekonomi yang kokoh. Hampir semua pengusaha besar kita menjalankan roda bisnis dengan manajemen yang tidak baik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *good governance* pada tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan

mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjebatani perbedaan diantara mereka.

2.2.2 Prinsip – Prinsip *Good governance*

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi

Setiap warga negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Kepastian Hukum (*Rule Of Law*)

Kerangka peraturan hukum dan perundangan-undangan haruslah berkadilan dan dapat ditegakkan serta dipatuhi secara utuh, terutama tentang aturan hukum dan hak asasi manusia.

3. Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat

disediakan secara memadai mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

4. Tanggung Jawab (*Responsiveness*)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

5. Berorientasi

Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak.

6. Berkeadilan

Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7. Efektifitas dan efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara madani memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik.

2.2.3 Manfaat *Good Governance*

Menurut Amin (2012) ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain yaitu :

1. Meminimalkan *agency cost*
2. Meningkatkan kinerja pemerintahan
3. Memperbaiki citra pemerintahan

2.2.4 Tujuan *Good Governance*

Menurut Amin (2012) ada beberapa tujuan yaitu :

1. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan
2. Aktiva pemerintahan dijaga dengan baik
3. Pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik dan sehat
4. Kegiatan pemerintahan dilakukan dengan baik dan transparan

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian menyangkut topik yang akan diteliti dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan topik penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1	Ashari, (2019)	Peran Akuntansi, <i>Good Governance</i> , Organisasi Sektor Publik	Penelitian Kualitatif	Akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan <i>good governance</i> , yaitu membantu meningkatkan kinerja dan pertanggungjawaban kegiatan dengan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2	Yulientinah et al., (2023)	Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal,	Metode Kuantitatif	Terdapat pengaruh yang signifikan dalam pengujian standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian

NO	Nama	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
		<i>Good Governance.</i>		internal terhadap <i>good governance.</i>
3	Haryadi & Handayani, (2014)	<i>Good Governance, Organisasi Sektor Publik, Peran Akuntansi.</i>	Metode Kualitatif	Sangat penting untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas, peran akuntan dapat membantu menyajikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan laporan kinerja sektor publik.
4	Yafizham (2024)	Peran Akuntansi, <i>Good Governance, Dinas Sosial</i>	Metode Kualitatif	Peran akuntansi dalam mewujudkan akuntabilitas sangatlah penting, dan sesuai dengan prinsip laporan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku
5	Niken Wahyu, (2022)	Peran Akuntansi, <i>Good Governance</i>	Metode Kualitatif	Peran akuntansi sangat penting karena dalam mengerjakan tugas atau wewenang yang telah ditetapkan dimudahkan dengan adanya sistem akuntansi tersebut guna untuk menjadi sebuah

NO	Nama	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
				patokan untuk menilai Baik atau buruknya kinerja suatu organisasi

Sumber : Berbagai jurnal penelitian 2024